



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA CIREBON 2019



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA CIREBON**



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT 2019

<https://cirebonkota.bps.go.id>



Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2019 Kota Cirebon

I S S N :
Nomor Publikasi/*Publication Number* : **3274. 19xx**
Katalog BPS/BPS Catalogue : **4102004.3274**

Ukuran Buku/*Book size* : **21 x 29,7 cm**
Jumlah Halaman/*Number of page* : **53 halaman**

NASKAH / MANUSCRIPT : **Budi Utami**
Agung Nur Rakhmawati

GAMBAR KULIT / COVER DESIGN : **Muhammad Maftuhin**

DITERBITKAN OLEH / PUBLISHED BY : **Badan Pusat Statistik Kota Cirebon**
Statistics Office of Cirebon Municipality

Boleh mengutip dengan menyebutkan sumbernya.
May be cited with reference to the source.



**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
TAHUN 2019
KOTA CIREBON**

Tim Penyusun

Pengarah : Joni Kasmuri, SST, SE, ME

Penanggung Jawab : Ipan Parin S, S.Si, M.Ec.Dev

Naskah : Budi Utami, SST
Agung Nur Rakhmawati, SST

Pengolah Data : BPS

Gambar Kulit : Muhammad Maftuhin, SST

Penyunting : Ipan Parin S, S.Si, M.Ec.Dev

<http://cirebonkota.bps.go.id>



Kata Pengantar

Indikator Kesejahteraan Rakyat 2019 menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Kota Cirebon antar waktu. Data yang digunakan bersumber dari BPS hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Proyeksi Penduduk Kota Cirebon 2010-2020.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Cirebon

Joni Kasmuri, SST SE ME
NIP. 196801181989021001



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT 2019

<https://cirebonkota.bps.go.id>



Daftar Isi

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	4
Daftar Isi	6
Daftar Tabel	7
Daftar Grafik	8
BAB I Kependudukan	
I.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk ..	11
I.2 Kepadatan Penduduk	12
I.3 Rasio Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan	13
I.4 Status Perkawinan	14
I.5 Penggunaan Alat/Cara KB.....	16
BAB II Kesehatan	
2.1 Status Kesehatan	18
2.2 Penolong Persalinan.....	21
BAB III Pendidikan	
3.1 Kemampuan Membaca dan Menulis	24
3.2 Tingkat Partisipasi Sekolah	25
BAB IV Ketenagakerjaan	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	29
BAB V Pola Konsumsi	
5.1 Pengeluaran Rumah Tangga	35
5.2 Indeks Gini	37
BAB VI Perumahan dan Lingkungan	
6.1 Kualitas Rumah Tinggal	39
6.2 Fasilitas Rumah Tinggal	40
6.3 Status Kepemilikan Rumah Tinggal	42
BAB VII Kemiskinan	
7.1 Perkembangan Penduduk Miskin	45
7.2 Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	46
BAB VIII Sosial Lainnya	
8.1 Teknologi Infomasi	50
8.2 Pemberian Kredit Usaha	51
8.3 Tindak Kejahatan	52



DAFTAR TABEL

		<i>Halaman</i>
Tabel 1	Beberapa Indikator Pendidikan Kota Cirebon, 2017-2018	26
Tabel 2	Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang dan Golongan Pengeluaran di Kota Cirebon (Rp), 2018	36
Tabel 3	Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Makanan dan Non Makanan di Kota Cirebon 2017-2018	36

<https://cirebonkota.bps.go.id>



DAFTAR GRAFIK

		<i>Halaman</i>
Grafik 1	Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Cirebon Tahun 2016-2018	12
Grafik 2	Kepadatan Penduduk Kota Cirebon Tahun 2016-2018	12
Grafik 3	Struktur Umur Penduduk Kota Cirebon, 2018	14
Grafik 4	Persentase Penduduk 15-49 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan, 2018	15
Grafik 5	Persentase Perempuan Berstatus Kawin dan Berumur 15-49 Tahun dan Status Penggunaan Alat/ Cara KB, 2018	16
Grafik 6	Angka Harapan Hidup Kota Cirebon, 2014-2018	19
Grafik 7	Angka Kesakitan, 2015-2018	20
Grafik 8	Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jaminan Kesehatan, 2018	21
Grafik 9	Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Yang Pernah Melahirkan, 2018	22
Grafik 10	Persentase Penduduk berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Karakteristik dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2018	25
Grafik 11	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas dan Angkatan Kerja di Kota Cirebon, Agustus 2018	30
Grafik 12	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin di Kota Cirebon, Agustus 2018	31
Grafik 13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kota Cirebon, Agustus 2017 dan 2018	32
Grafik 14	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Kota Cirebon, Agustus 2017 dan 2018	33
Grafik 15	Indeks Gini Kota Cirebon, 2016-2018	37
Grafik 16	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kota Cirebon, 2018	40
Grafik 17	Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan	41



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT 2019

	di Kota Cirebon Tahun 2017-2018	
Grafik 18	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tahun 2018	42
Grafik 19	Jumlah Penduduk Miskin di Kota Cirebon, 2016-2018 (Maret, ribuan orang)	46
Grafik 20	Garis Kemiskinan di Kota Cirebon, 2016-2018 (Rupiah/Kapita/Bulan)	47
Grafik 21	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Cirebon, 2016-2018	48
Grafik 22	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Cirebon, 2016-2018	48
Grafik 23	Persentase Anggota RT berusia 5 Tahun Ke Atas Menurut Karakteristik Dan Penggunaan Teknologi Informasi, 2018	50
Grafik 24	Persentase Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha di Kota Cirebon, 2016-2018	51
Grafik 24	Persentase penduduk menjadi Korban Kejahatan di Kota Cirebon, Maret 2017-2018	52



Bab I

Kependudukan

<https://cirebonkota.kps.go.id>

Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/ atau data agregat penduduk (Undang-Undang No. 24 Tahun 2013). Data kependudukan diperlukan antara lain untuk perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, dan penyediaan pelayanan publik.

Dari waktu ke waktu jumlah penduduk terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk yang tinggi menjadi kendala pembangunan apabila tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduknya. Kebutuhan sandang, pangan, dan papan mengalami peningkatan, namun lahan pertanian dan lahan pekerjaan yang terbatas mengakibatkan munculnya beragam masalah sosial.

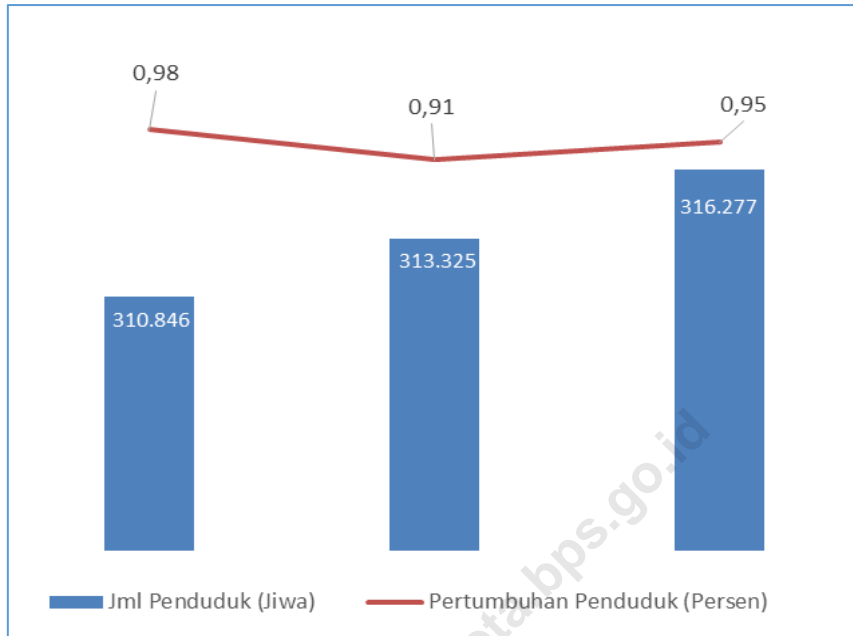
Tahun 2030 Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi, yaitu ketika jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif (berusia dibawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Bonus demografi menjadi sebuah kesempatan emas ketika dapat memanfaatkannya dengan optimal. Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia akan menjadi modal Indonesia menjadi negara maju.

1.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Pada tahun 2018, berdasarkan angka proyeksi, penduduk Kota Cirebon berjumlah 316.277 jiwa. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 dan tahun 2016. Apabila dibandingkan dengan penduduk Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 48,64 juta jiwa, jumlah penduduk Kota Cirebon sekitar 0,65 persen dari jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat.



Grafik 1
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kota Cirebon, 2016-2018

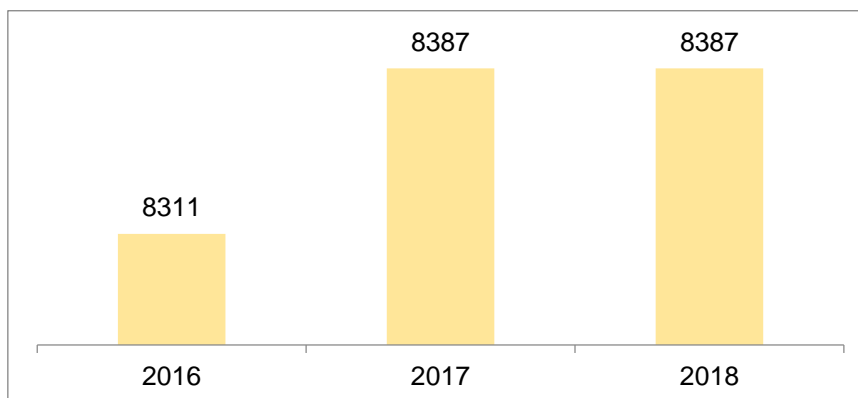


Sumber : Proyeksi Penduduk Kota Cirebon 2010-2020, diolah

1.2 Kepadatan Penduduk

Selain jumlah penduduk, persoalan lain yang menjadi perhatian adalah kepadatan dan distribusi penduduk yang tidak merata. Pada tahun 2018, pada setiap 1 km² terdapat 8.387 jiwa penduduk. Kepadatan jumlah penduduk Kota Cirebon pada tahun 2018 sama dengan kepadatan penduduk pada tahun 2017, dan lebih tinggi dibandingkan kepadatan penduduk pada tahun 2016.

Grafik 2.
Kepadatan Penduduk Kota Cirebon, 2016-2018



1.3 Rasio Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan angka perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah. Sedangkan angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) menunjukkan berapa tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Komposisi penduduk Kota Cirebon lebih banyak adalah laki-laki. Rasio jenis kelamin penduduk Kota Cirebon pada tahun 2018 sebesar 100,57. Artinya, pada setiap 100 penduduk perempuan yang tinggal di Kota Cirebon terdapat 101 penduduk laki-laki, atau dengan kata lain jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

Gambar 1.

Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Cirebon 2016-2018



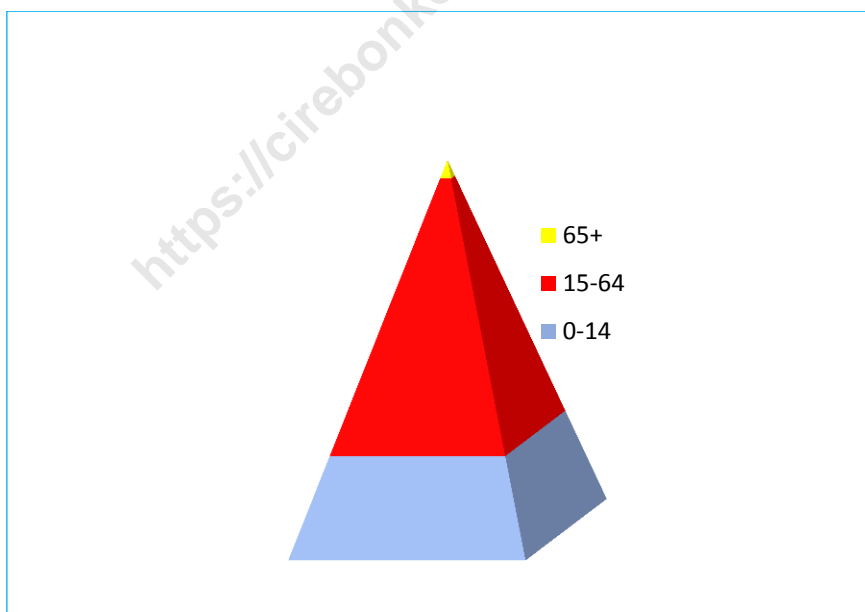
Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan perbandingan penduduk usia yang belum dan tidak produktif lagi dengan jumlah penduduk usia produktif. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Semakin rendahnya angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.



Penduduk Kota Cirebon pada tahun 2018 didominasi penduduk usia produktif, terlihat dari angka beban ketergantungan sebesar 44,29. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 44 penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Angka beban ketergantungan pada tahun 2018 sedikit meningkat dibandingkan angka beban ketergantungan pada tahun 2017.

Struktur umur penduduk Kota Cirebon didominasi oleh penduduk usia produktif. Persentase penduduk usia muda (0-14 tahun sebesar 26,02 persen. Persentase penduduk usia tua (65+) sebesar 4,67 persen. Sementara persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 69,30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Cirebon sangat potensial sebagai modal dasar untuk pembangunan.

Grafik 3
Struktur Umur Penduduk Kota Cirebon, 2018



1.4 Status Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembentukan keluarga yang bahagia erat kaitannya dengan keturunan.

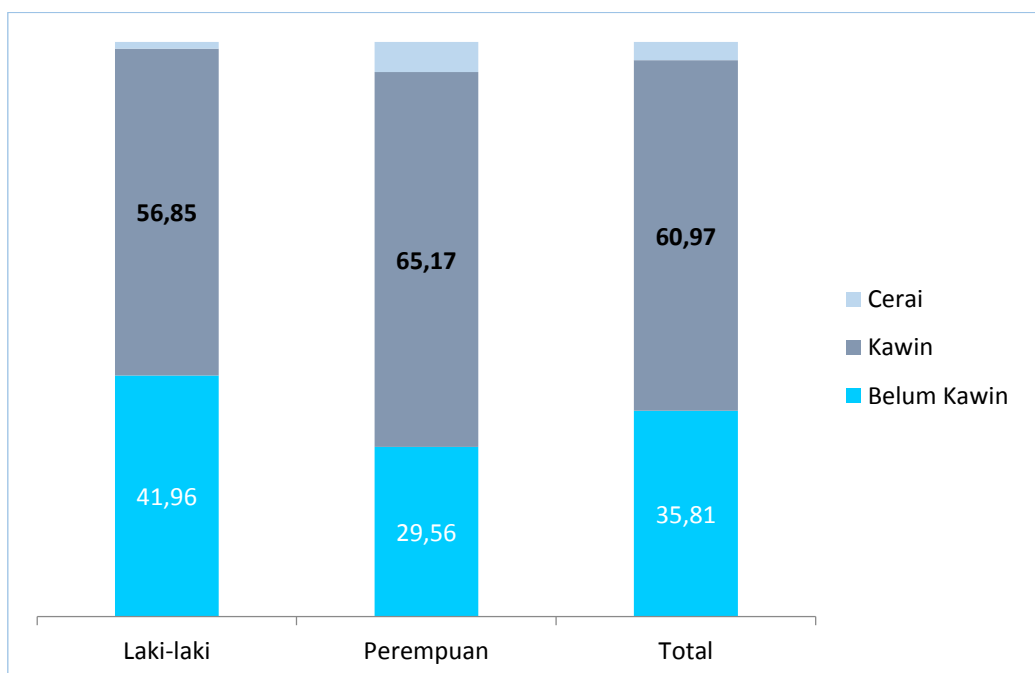
Berdasarkan hasil Susenas tahun 2018, persentase penduduk 10 tahun ke atas yang berstatus belum kawin sebesar 33,56 persen, berstatus kawin sebesar 57,63 persen, dan berstatus cerai sebesar 8,81 persen. Apabila ditelaah, persentase penduduk 10 tahun ke atas berstatus cerai lebih tinggi perempuan dibanding laki-laki.

Usia 15-49 tahun merupakan usia sangat produktif. Berdasarkan hasil Susenas, dari seluruh penduduk usia 15-49 tahun, persentase penduduk yang berstatus belum kawin sebanyak 35,81 persen; berstatus kawin sebanyak 60,97 persen; dan berstatus cerai sebanyak 3,22 persen. Apabila menelaah dari jenis kelamin, persentase penduduk yang berstatus belum kawin laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Sementara penduduk yang berstatus kawin, persentase perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Demikian pula penduduk yang berstatus cerai, persentase perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki.

Grafik 4.

Persentase Penduduk 15-49 Tahun

Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan, 2018





Berdasarkan hasil Susenas tahun 2018, sebagian besar wanita produktif di Kota Cirebon sebanyak 65,17 persen berstatus kawin. Persentase wanita yang belum kawin relatif besar jumlahnya yaitu sebesar 29,56 persen. Dengan banyaknya persentase wanita usia produktif yang belum kawin, maka diperlukan pendidikan dan pembinaan wanita usia pra-nikah dengan baik. Diharapkan pengetahuan tentang perkawinan, persalinan dan pengasuhan anak dapat tergambar secara lebih baik. Sehingga ketika pada waktunya menikah, wanita tersebut telah memiliki pengetahuan yang baik terkait hal tersebut di atas. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh pada angka kematian bayi dan juga pada angka prevalensi stunting.

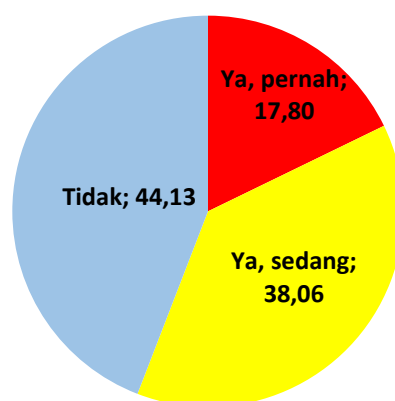
1.5 Penggunaan Alat/ Cara KB

Pemerintah sudah sejak lama menggalakkan program KB (Keluarga Berencana). Program ini tidak hanya bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk melalui kelahiran, tetapi juga bisa meningkatkan kualitas kesehatan ibu serta mewujudkan bonus demografi yang berkualitas.

Di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) termasuk didalamnya kemitraan global keluarga berencana yang dikenal sebagai family planning 2020 (FP2020). Tujuan dari FP2020 adalah mendukung hak-hak setiap perempuan untuk dapat menentukan secara bebas dan untuk diri mereka sendiri, apakah mereka ingin memiliki anak, kapan akan memilikinya, dan berapa jumlah anak yang ingin dimiliki.

Grafik 5.

Persentase Perempuan Berstatus Kawin dan Berumur 15-49 Tahun dan Status Penggunaan Alat/ Cara KB, 2018





Bab II

Kesehatan

<https://cirebon.go.id>



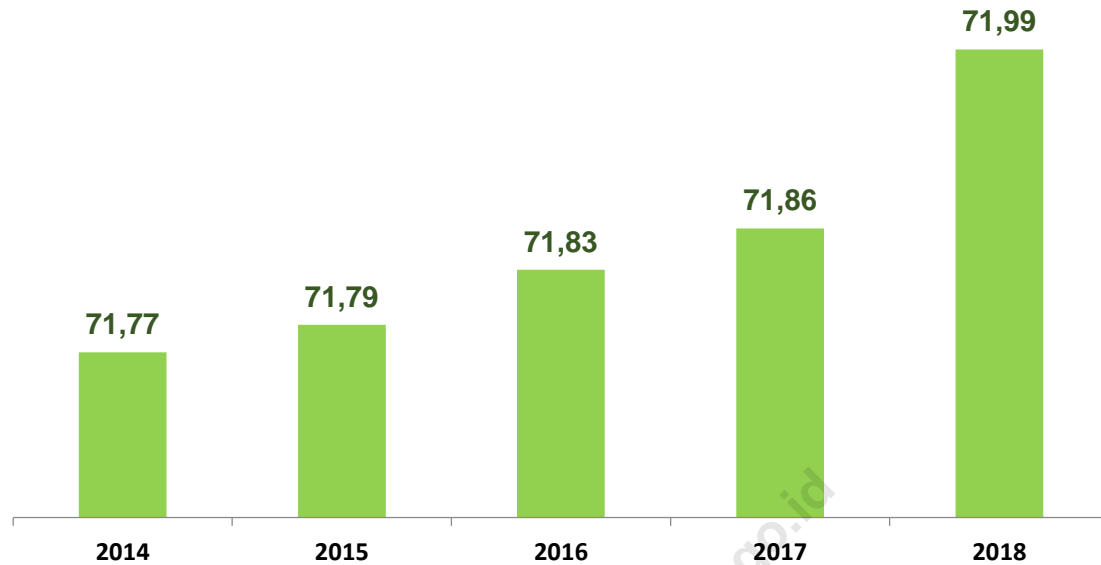
Salah satu tujuan nasional adalah memajukan kesejahteraan bangsa, yang berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan ketenteraman hidup. Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, jadi tanggung jawab untuk terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat, pemerintah dan swasta bersama-sama. Dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah sudah melakukan berbagai program-program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, seperti dengan meningkatkan fasilitas kesehatan melalui BPJS, puskesmas-puskesmas, meningkatkan fasilitas tenaga kesehatan, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, meningkatkan tingkat Imunitas dan gizi balita, dan sebagainya.

Berhasil tidaknya program-program pemerintah dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan berbagai indikator kesehatan seperti Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Angka Kesakitan, prevalensi Balita Kurang Gizi dan indikator-indikator yang lain yang berkaitan dengan tenaga medis dan fasilitas kesehatan.

2.1 Status Kesehatan

Salah satu dimensi kesehatan bisa dilihat dari angka harapan hidup (AHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Kota Cirebon telah berhasil meningkatkan angka harapan hidup (AHH) penduduknya. Pada tahun 2014, AHH di Kota Cirebon sebesar 71,77 tahun. Hingga pada tahun 2018, AHH terus mengalami peningkatan mencapai 71,99 tahun. Semakin meningkatnya angka harapan hidup mengindikasikan bahwa masyarakat Kota Cirebon mengalami usia yang lebih panjang dari tahun ke tahun.

Peningkatan angka harapan hidup dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain semakin baik dan semakin mudah akses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat. Selain itu, semakin baiknya perilaku hidup sehat masyarakat dan semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Ditambah lagi daya dukung kondisi lingkungan yang semakin baik.

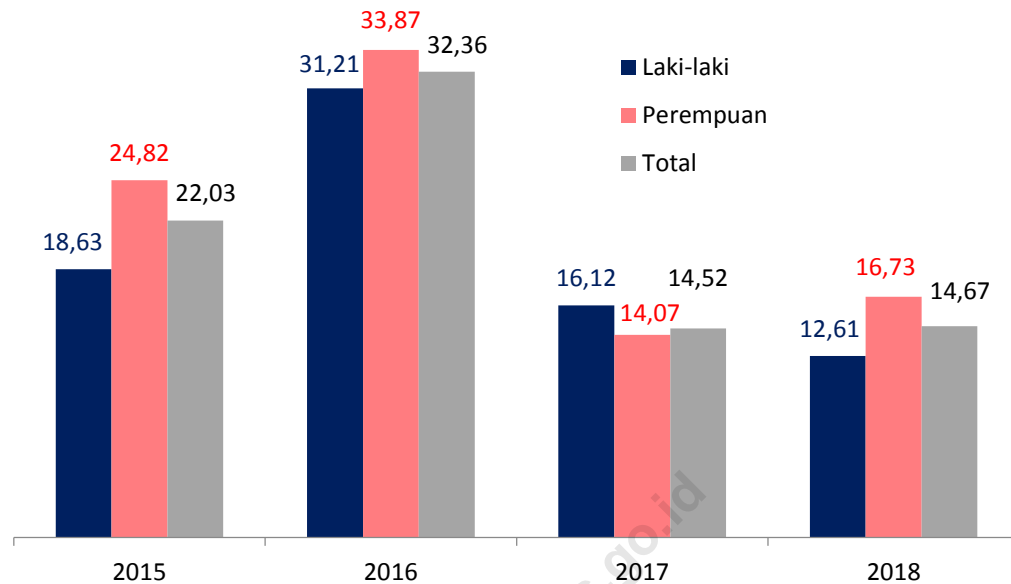
Grafik 6. Angka Harapan Hidup Kota Cirebon, 2014-2018

Angka kesakitan merupakan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya, keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya (BPS)

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan.



Grafik 7. Angka Kesakitan, 2015-2018



Berdasarkan hasil Susenas tahun 2018 angka kesakitan penduduk Kota Cirebon mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin persentase penduduk perempuan yang sakit lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki. Angka kesakitan penduduk laki-laki sebesar 12,61 persen, sementara angka kesakitan penduduk perempuan sebesar 16,73 persen.

Ketika seseorang sakit, maka sudah tentu orang yang sakit tersebut akan mengoptimalkan ikhtiarnya untuk mengembalikan kesehatannya agar aktivitas sehari-harinya tidak terganggu. Berbagai ikhtiar dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keluhan kesehatan untuk mengembalikan kesehatannya salah satunya adalah dengan berobat jalan. Berobat jalan adalah upaya anggota rumah tangga yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke anggota rumah tangga. Akibat dari berobat jalan tentunya seorang yang memiliki keluhan kesehatan harus membayar biaya berobat jalan selama proses penyembuhannya.

Akses biaya kesehatan yang murah dan mudah terjangkau merupakan harapan semua lapisan masyarakat. Pemerintah mewujudkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memastikan semua orang memiliki akses layanan kesehatan yang dibutuhkan dengan kualitas yang baik. Pada tahun 2018,

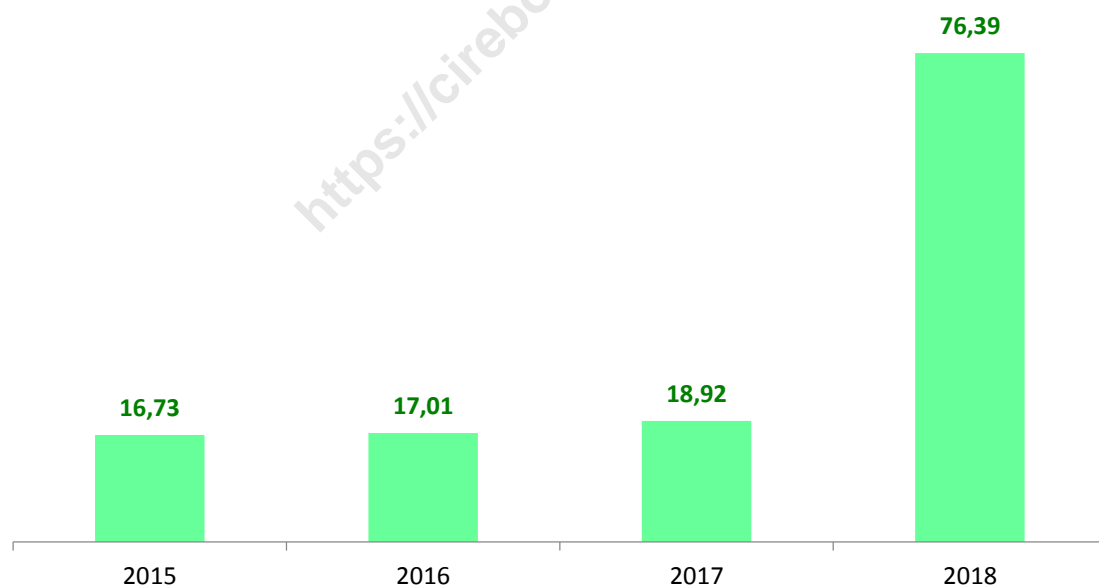
INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT 2019

persentase penduduk Kota Cirebon yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan sebesar 76,39 persen. Persentase tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan, apabila dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 hingga 2017 persentase penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan masing-masing sebesar 16,73 persen; 17,01 persen; dan 18,92 persen.

Apabila ditelaah menurut jenis kelamin, penduduk perempuan yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki. Persentase penduduk laki-laki yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan mencapai 70,30 persen. Sementara itu, persentase penduduk perempuan yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan mencapai 80,68 persen.

Grafik 8.

Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jaminan Kesehatan, 2018



2.2 Penolong Persalinan

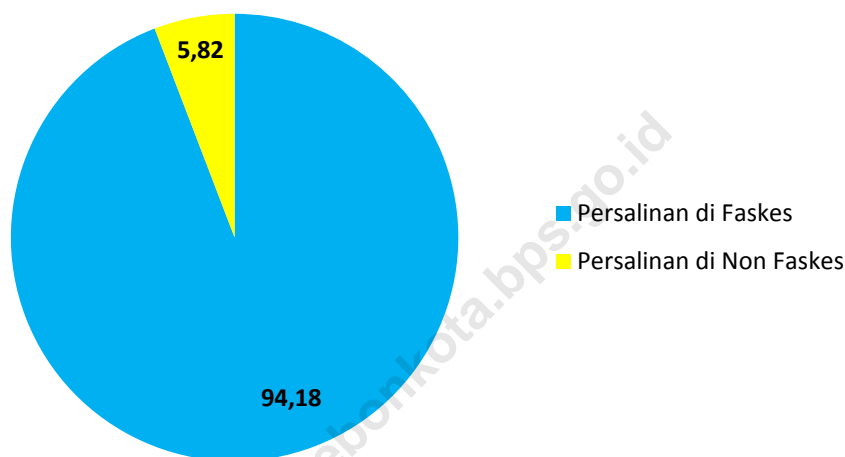
Angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi. Tingginya angka kematian ibu bisa disebabkan oleh perencanaan kehamilan yang kurang matang, sehingga perempuan melahirkan terlalu banyak, terlalu dekat, terlalu muda, atau terlalu tua. Selain itu, tingginya angka kematian ibu disebabkan oleh persalinan yang ditolong oleh tenaga yang tidak kompeten dalam bidang kebidanan.



Pemerintah terus berupaya menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Program Keluarga Harapan digulirkan untuk menjamin pemenuhan gizi ibu hamil dan pemenuhan kebutuhan persalinan terpenuhi.

Grafik 9.

**Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun
Yang Pernah Melahirkan, 2018**



Pada tahun 2018, di Kota Cirebon masih ada penduduk perempuan usia 15-49 tahun yang pernah melahirkan bukan di fasilitas kesehatan. Namun sudah semua perempuan usia 15-49 tahun yang pernah melahirkan, proses persalinannya ditolong oleh tenaga kesehatan.



Bab III

Pendidikan

<https://cirebonkota.go.id>



Salah satu upaya paling strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting karena merupakan dasar untuk pengembangan pola berpikir konstruktif dan kreatif. Dengan pendidikan yang cukup memadai, maka seseorang akan bisa berkembang secara optimal baik secara ekonomi maupun sosial. Rumusan tentang pendidikan, lebih jauh termuat dalam UU. No. 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan Indonesia bertujuan agar masyarakat Indonesia mempunyai pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Artinya, arah dari proses pendidikan nasional mencakup berbagai aspek kehidupan diri manusia dan masyarakat untuk *survive* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa aspek yang berkaitan dengan pendidikan dapat memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia yang ada antara lain harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi sekolah.

Beberapa indikator output yang dapat menunjukkan kualitas pendidikan SDM antara lain kemampuan membaca dan menulis, angka partisipasi sekolah (APS), dan angka partisipasi murni (APM). Indikator input pendidikan salah satunya adalah fasilitas pendidikan.

3.1 Kemampuan Membaca dan Menulis

Indikator mendasar yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan membaca dan menulis adalah angka melek huruf (AMH) atau *literacy rate*. AMH merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan bidang pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia suatu daerah.

Kemampuan membaca dan menulis sangat penting karena dapat mencerdaskan intelektual, spiritual, emosional, dan kepercayaan. Membaca akan membuka peluang untuk menyerap sebanyak mungkin ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan dan memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan membaca dan menulis juga bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan kreatif, kritis, analitis dan imajinatif sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas.

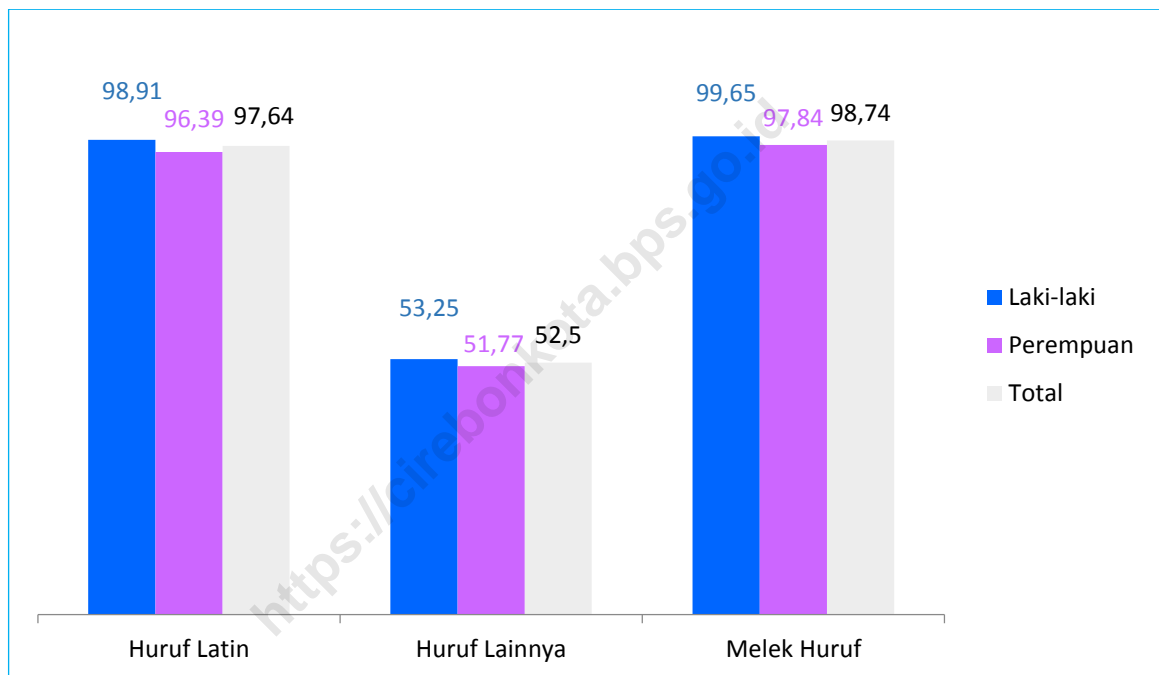
Penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan komponen masyarakat yang potensial, yang sudah seharusnya dapat membaca dan menulis huruf latin. Namun

pada kenyataannya pada tahun 2018, masih ada sekitar 2,36 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin.

Kemampuan membaca dan menulis penduduk laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Demikian pula, angka melek huruf penduduk laki-laki lebih tinggi dibanding angka melek huruf penduduk perempuan.

Grafik 10.

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Karakteristik dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2018



3.2 Partisipasi Sekolah

Salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) adalah menjamin bahwa sampai dengan tahun 2030 semua anak, baik laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar (*primary schooling*). Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan.

Pada tahun 2018 masih terdapat sekitar 0,36 persen penduduk usia 7-12 tahun di Kota Cirebon yang belum mengenyam pendidikan atau tidak bersekolah. Adapun pada kelompok usia 13-15 tahun terdapat sebanyak 8,46 persen penduduk yang belum mengenyam pendidikan. Pada kelompok usia 13-15 tahun APS



perempuan lebih tinggi dibanding APS laki-laki. Sebaliknya pada kelompok usia 16-18 tahun, APS laki-laki lebih unggul dibanding APS perempuan.

Tabel 1. Beberapa Indikator Pendidikan Kota Cirebon, 2017-2018

Indikator	Laki-Laki		Perempuan		Total	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Rata-rata Lama Sekolah (penduduk usia 25+ tahun)	10,42	10,43	9,30	9,31	9,88	9,89
Harapan Lama Sekolah (penduduk usia 7+ tahun)	12,76	12,77	13,37	13,38	13,08	13,09
Angka Partisipasi Sekolah (APS)						
7-12 tahun	100,00	99,91	100,00	99,34	100,00	99,64
13-15 tahun	96,59	87,99	93,45	95,47	95,02	91,54
16-18 tahun	69,00	81,67	72,09	72,24	70,61	74,82
Angka Partisipasi Murni (APM)						
SD	99,55	96,03	99,27	93,53	99,42	94,85
SMP	83,05	76,45	83,17	66,87	83,11	71,91
SMA	55,31	65,67	55,99	66,18	55,67	65,93

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat digunakan untuk mengukur pemerataan akses terhadap pendidikan. Namun, informasi yang diperoleh dari APS tidak memperhitungkan anak pada suatu kelompok yang benar-benar bersekolah pada jenjangnya.

Angka partisipasi murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Pada tahun 2018, capaian APM usia SD di Kota Cirebon telah mencapai 94,85 persen. Sementara itu, APM SMP telah mencapai 71,91 persen. APM usia SMA berada pada kisaran 65,93 persen.

Harapan Lama Sekolah

Harapan lama Sekolah pada tahun 2018 mengalami peningkatan. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah dapat diartikan bahwa semakin baik peluang penduduk untuk mengenyam pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Di tahun 2018, Harapan Lama Sekolah penduduk Kota Cirebon telah mencapai 13,09 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun pada tahun 2018 memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D1.

Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas pendidikan masyarakat suatu wilayah. Indikator ini merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kota Cirebon pada tahun 2018 mencapai 9,89. Nilai tersebut mengandung makna bahwa secara rata-rata penduduk Kota Cirebon pada tahun 2018 yang berusia diatas 25 tahun telah menyelesaikan pendidikannya hingga SMA kelas 1 tapi tidak selesai.

<https://cirebon.go.id>



Bab IV

Ketenagakerjaan

<https://cirene.kotabangs.go.id>

Permasalahan di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan wilayah dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2018 kondisi Agustus. Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja, serta persentase pekerja menurut kelompok upah/ gaji/pendapatan bersih.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator

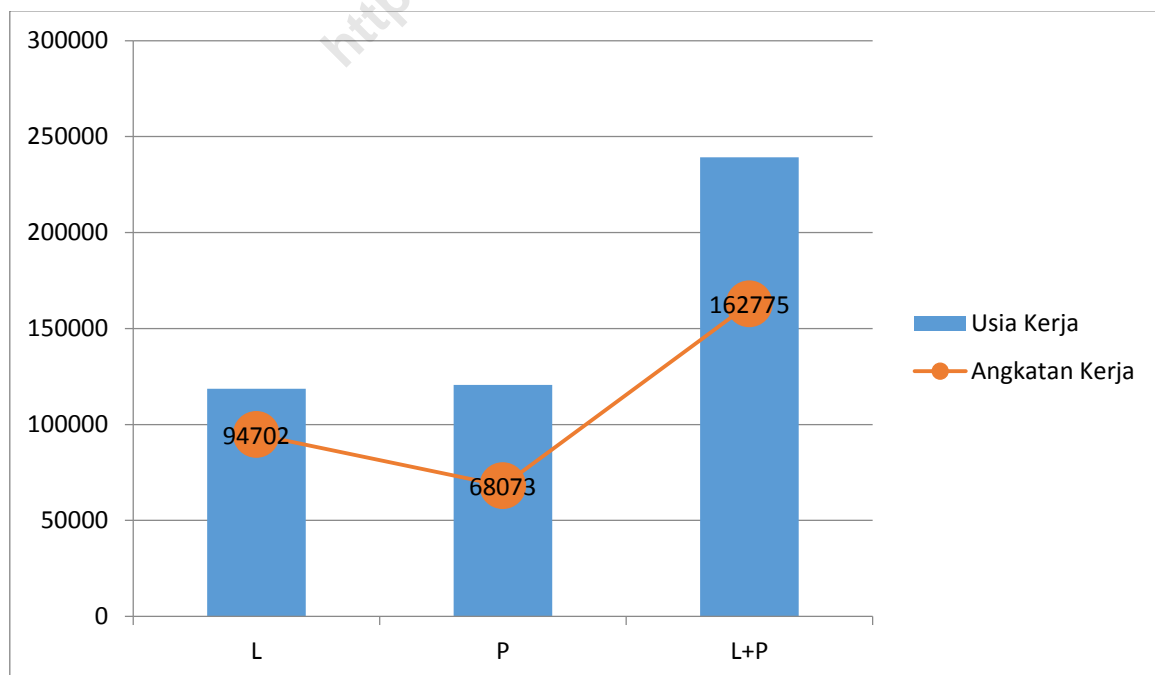


yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Penduduk usia kerja (lebih dari 15 tahun) di Kota Cirebon Agustus 2018 sebanyak 239.255 orang bertambah 3.266 dibandingkan tahun 2017. Adapun jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran) pada Agustus 2018 mencapai 162.775 orang. Sedangkan jumlah penduduk bukan angkatan kerja mencapai 76.480 orang atau 31,97 persen dari penduduk usia kerja.

Grafik 11. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas dan Angkatan Kerja di Kota Cirebon, Agustus 2018



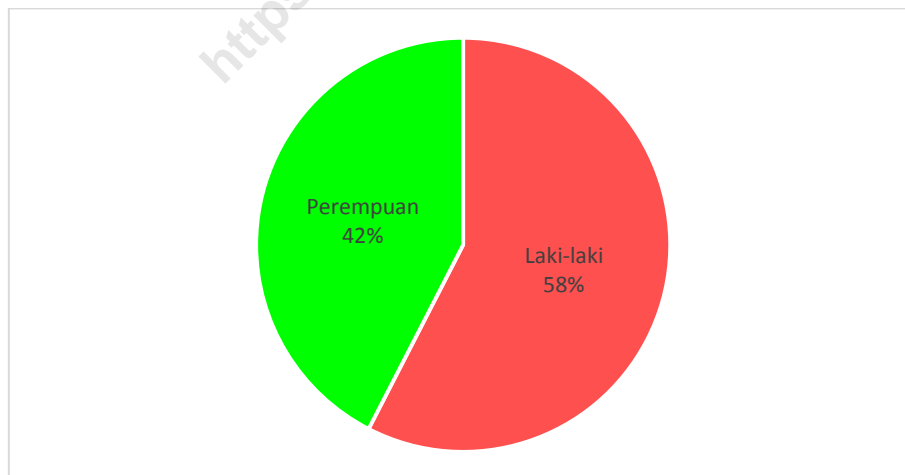
Sumber : Keadaan Angkatan kerja di Jawa Barat Agustus 2018

Jika dilihat jumlah penduduk usia kerja menurut jenis kelamin pada periode Agustus 2018, jumlah penduduk Laki-laki sebesar 118.669 orang atau sebesar 49,60 persen dari total jumlah penduduk usia kerja. Sedangkan untuk perempuan sebesar 120.586 orang.

Dari total angkatan kerja sebanyak 162.775 orang pada Agustus 2018, sebanyak 90,94 persennya melakukan aktivitas bekerja atau sebanyak 148.033 orang. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, maka jumlah penduduk bekerja laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Pada keadaan Agustus 2018 jumlah penduduk bekerja laki-laki mencapai 86.462 orang, sedangkan perempuan sebanyak 61.571 orang.

Grafik 12. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin di Kota Cirebon, Agustus 2018



Sumber : Sakernas, Agustus 2018

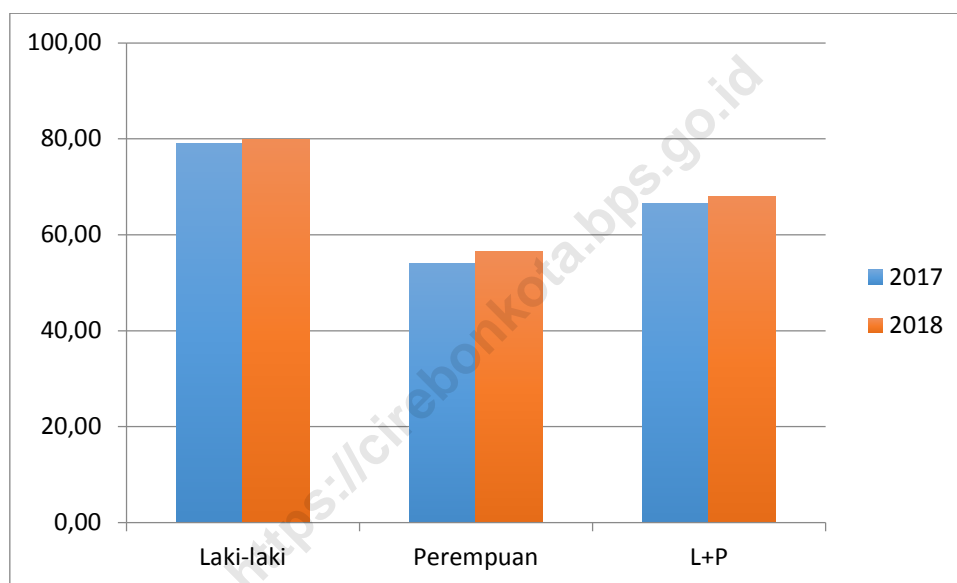
Terdapat perbedaan pergerakan TPAK antara laki-laki dengan perempuan. TPAK laki-laki menunjukkan peningkatan sebesar 0,79 persen dari 79,01 persen pada tahun 2017 menjadi 79,8 persen di tahun 2018. Sedangkan TPAK perempuan



meningkat sebesar 2,36 persen dari 54,09 persen pada Agustus 2017 menjadi 56,45 persen pada Agustus 2018. Secara keseluruhan TPAK laki-laki dan perempuan meningkat sebesar 1,58 persen dari 66,45 persen pada tahun 2017 menjadi 68,03 persen pada tahun 2018.

Selama periode Agustus 2017 hingga Agustus 2018, TPAK laki-laki lebih tinggi dari TPAK perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi masih lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Grafik 13. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kota Cirebon, Agustus 2017 dan 2018



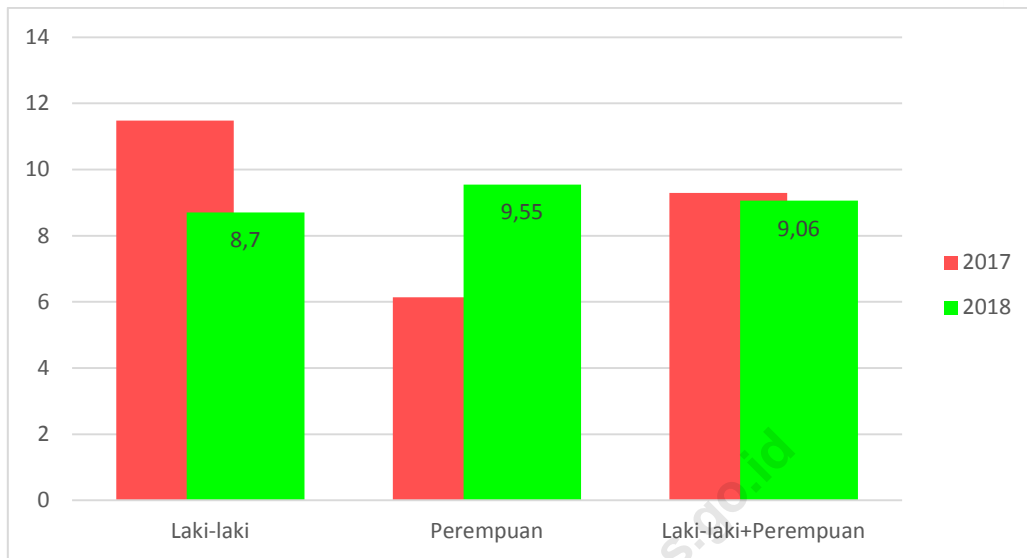
Sumber : Sakernas, Agustus 2017 dan 2018

Seperti halnya TPAK, Tingkat pengangguran terbuka (TPT) keadaan Agustus 2018 di Kota Cirebon turun jika dibandingkan keadaan Agustus 2017 sebesar 0,23 persen dari 9,29 persen di tahun 2017 menjadi 9,06 persen di tahun 2018. Selama periode Agustus 2017 dan Agustus 2018 tingkat pengangguran terbuka laki-laki menunjukkan penurunan. Keadaan Agustus 2017 TPT laki-laki mencapai 11,48 persen, kemudian menurun 2,78 persen menjadi 8,7 persen pada Agustus 2018. Adapun TPT perempuan pada keadaan Agustus 2017 mencapai 6,14 persen kemudian meningkat 3,41 persen menjadi 9,55 persen pada keadaan Agustus 2018.



Grafik 14.

**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Kota Cirebon,
Agustus 2017 dan 2018**



Sumber : Sakernas, Agustus 2017 dan 2018

<https://cirebonkota.bps.go.id>



Bab V

Pola Konsumsi

<https://carbontracker.bps.go.id>



Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut.

Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

5.1 Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.



Tabel 2. Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang dan Golongan Pengeluaran di Kota Cirebon (Rp), 2018

Kelompok Barang	Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)						
	150.000	200.000	300.000	500.000	750.000	1.000.000	Lebih dari 1.500.000
	-	-	-	-	-	-	-
	199.999	299.999	499.999	749.999	999.999	1.499.999	
Makanan	-	190.025	276.670	385.967	474.725	657.994	950.730
Non Makanan	-	77.258	123.980	225.391	387.256	562.815	1.737.276
Total	-	267.283	400.651	611.358	861.981	1.220.809	2.688.006

Sumber : Pola Konsumsi Penduduk Jawa Barat 2018

Tabel 2 menyajikan pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok barang dan golongan pengeluaran. Berdasarkan tabel ini terlihat pada golongan dari Rp. 200.000 - Rp.299.999 hingga golongan pengeluaran Rp. 1.000.000 – Rp. 1.499.999 pengeluaran tertinggi adalah pada kelompok makanan dibandingkan dengan non-makanan. Sedangkan untuk golongan pengeluaran dari Rp. 1.500.000 ke atas pengeluaran untuk kelompok makanan lebih kecil dibandingkan pengeluaran kelompok non makanan.

Tabel 3. Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Makanan dan Non Makanan di Kota Cirebon, 2017–2018

Kelompok Barang	2017	2018	Pertumbuhan (%)
Makanan	535.782	540.484	0,88
Non Makanan	582.376	631.400	8,42
Total	1.118.158	1.171.884	4,80

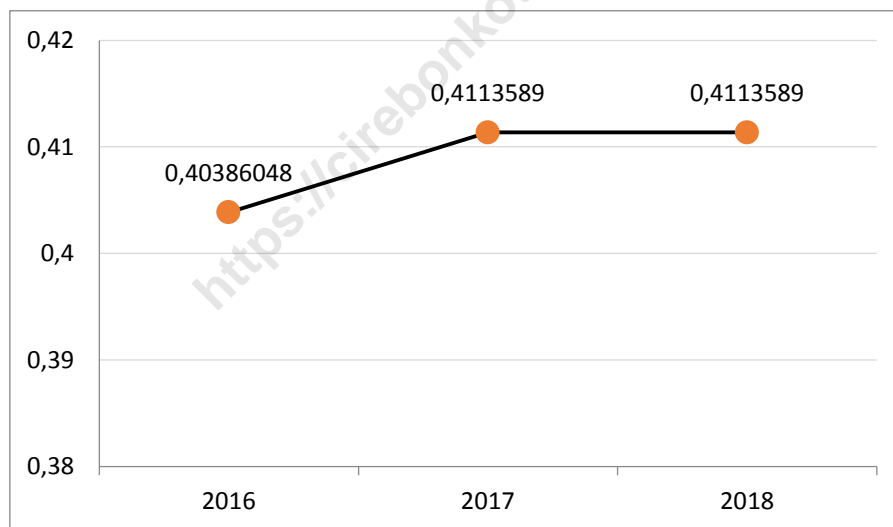
Sumber : Susenas, 2018

Jika dirinci menurut kelompok barang terlihat bahwa peningkatan pengeluaran rata-rata per kapita sebulan kelompok makanan lebih tinggi dibandingkan non makanan. Pada tahun 2018 pengeluaran rata-rata per kapita makanan mencapai Rp 540.484 atau meningkat sebesar 0,88 persen dibandingkan tahun 2017. Sedangkan pengeluaran perkapita sebulan untuk non makanan tahun 2018 mencapai Rp 631.400 atau meningkat 8,42 persen dibandingkan tahun 2017.

5.2 Indeks Gini

Peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan, karena pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai proxy pendapatan. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk adalah dengan indikator yang sering digunakan, yaitu Indeks Gini.

Grafik 15. Indeks Gini Kota Cirebon, 2016–2018



Indeks Gini sejak 2016 hingga 2018 tidak terlalu mengalami perubahan signifikan setiap tahunnya, yaitu berada pada kisaran 0,40 – 0,41. Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan antar kelompok cenderung tidak terlalu berubah selama tiga tahun berturut-turut.



Bab VI

Perumahan dan Lingkungan

<https://cirebonkota.bps.go.id>

Kebutuhan dasar manusia setelah pangan dan sandang adalah papan. Papan dalam hal ini adalah kebutuhan akan rumah tempat tinggal yang layak baik dari segi fisik, fasilitas maupun lingkungannya. Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan salah satu faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Peningkatan kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Fungsi rumah adalah sebagai tempat tinggal, selain itu juga rumah dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Status sosial seseorang yang makin tinggi, semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik dan fasilitas yang lengkap. Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

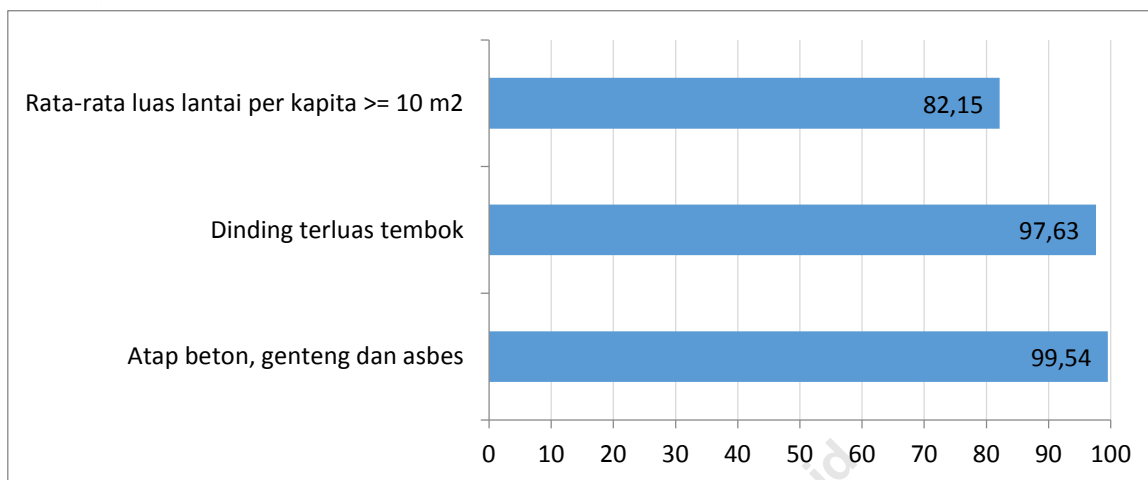
6.1. Kualitas Rumah Tinggal

Terdapat beberapa kriteria rumah tinggal yang harus dipenuhi sehingga dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal. Kriteria tersebut diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok, dengan beratapkan beton, genteng dan asbes. Data hasil Susenas 2018 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok yaitu sebesar 97,63. Pada tahun 2018, rumah yang memiliki atap beton, genteng dan asbes sebesar 99,54 persen.



Grafik 16.

Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kota Cirebon, 2018



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat 2018

Menurut standar *World Health Organization* (WHO) tentang rumah layak huni menyebutkan bahwa rumah yang sehat adalah rumah dengan luas per kapitanya sebesar $10 \text{ m}^2/\text{orang}$. Artinya dengan asumsi satu rumahtangga terdiri dari 4 (empat) orang maka rumah yang sehat menurut ukuran WHO, rumahtangga tersebut harus memiliki rumah idealnya minimal dengan luas 40 m^2 . Adapun menurut Kementerian Kesehatan standar rumah sehat adalah dengan luas per kapitanya sebesar $8 \text{ m}^2/\text{orang}$. Di samping tingkat derajat kesehatan penghuninya, luas lantai juga sering dianggap sebagai gambaran tingkat kesejahteraan/status sosial penghuninya. Semakin luas lantai yang dimiliki oleh suatu rumahtangga maka asumsinya semakin sehat dan sejahtera penghuninya. Bila merujuk pada standar WHO di mana luas per kapita ideal (minimal 10 meter persegi) maka persentase rumahtangga di Kota Cirebon dengan luas per kapita ideal sebesar 82,15 persen.

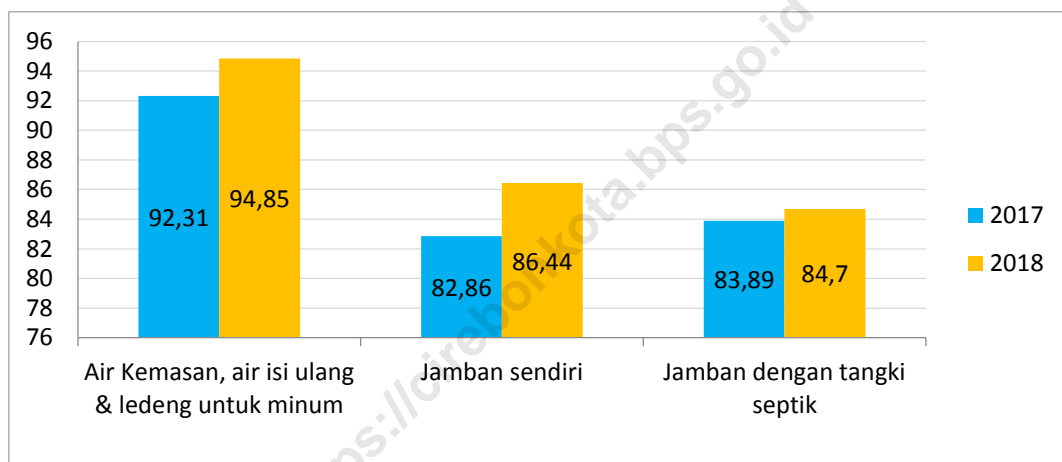
6.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Fasilitas rumah tinggal merupakan pemenuhan atas kebutuhan aktivitas seluruh anggota rumah tangga. Kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal akan menentukan kualitas dan kenyamanan rumah tinggal. Fasilitas-fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Air bersih yang tersedia dalam jumlah yang

cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Rumah tangga di Kota Cirebon tahun 2018 yang menggunakan air kemasan, air isi ulang, dan air ledeng sebagai sumber air minum mencapai 94,85 persen. Terdapat peningkatan persentase rumah tangga yang menggunakan air kemasan, air isi ulang dan ledeng dibandingkan tahun 2017 untuk minum sebesar 2,54 persen dimana pada tahun 2017 yang menggunakan air kemasan, air isi ulang, dan air ledeng sebagai sumber air minum mencapai 92,31 persen.

Grafik 17. Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, di Kota Cirebon Tahun 2017 -2018



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat 2018

Selain fasilitas ketersediaan air minum, penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Pembuangan kotoran manusia yang tidak sesuai dengan standar kesehatan akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Dampak lebih lanjutnya menyebabkan berbagai macam penyakit seperti *thypus*, disentri, kolera, dan sebagainya. Oleh sebab itu, untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Salah satu fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik.

Selama tahun 2017-2018 persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri meningkat dari 82,86 persen menjadi 86,44 persen. Hal ini menunjukkan



bahwa kebutuhan akan jamban sendiri sudah menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh rumah tangga. Selanjutnya selain telah memiliki jamban sendiri, penggunaan jamban dengan tangki septik juga merupakan bagian dari kualitas kehidupan bagi rumah tangga dalam memenuhi salah satu kriteria rumah sehat. Pada tahun 2018 rumah tangga yang menggunakan jamban dengan tangki septik sudah mencapai 84,70 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 83,89 persen.

6.3 Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Grafik 18. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah, Tahun 2018



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat 2018

Hasil Susenas 2018 menunjukkan bahwa rumah tangga menempati rumah milik sendiri sebesar 62,6 persen. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri sebesar 37,4 persen.



Bab VII

Kemiskinan

<https://cirebonkota.go.id>



Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Kemiskinan harus menjadi sebuah tujuan utama dari penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia, karena aspek dasar yang dapat dijadikan acuan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah teratasinya masalah kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain "seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin".

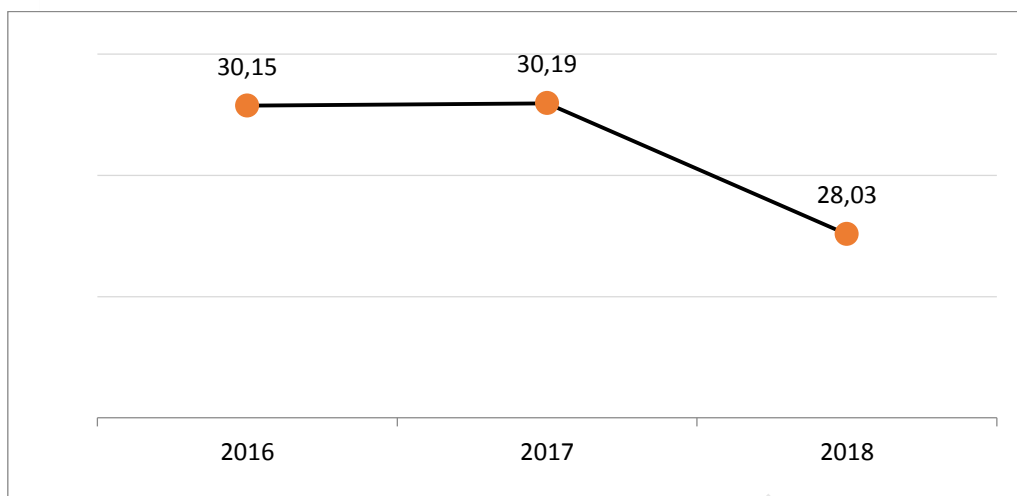
Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan

dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan.

Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Berbagai program pemberantasan kemiskinan dirancang dan diterapkan di berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang. Terbentuknya *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai pengganti *Millenium Development Goals (MDGs)* merupakan agenda pembangunan Pasca MDGs yang berakhir tahun 2015. Target yang pertama dari SDGs adalah mengakhiri kemiskinan, dengan beberapa indikator pendukung antara lain menurunkan jumlah orang yang hidup kurang dari \$1,25 per hari. Indikator lain yang terkait dalam mengakhiri kemiskinan antara lain melindungi orang yang miskin dan rentan dengan sistem perlindungan sosial.

7.1 Perkembangan Penduduk Miskin

Penduduk miskin di Kota Cirebon secara total menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2016-2018 (keadaan bulan Maret). Tahun 2016, jumlah penduduk miskin sebesar 30,15 ribu jiwa atau 9,73 persen dari jumlah seluruh penduduk Kota Cirebon, pada Maret tahun 2017 jumlah penduduk miskin menjadi 30,19 ribu jiwa atau 9,66 persen dari jumlah penduduk. Pemerintah Kota Cirebon semakin gencar untuk menekan angka kemiskinan ini sehingga angka kemiskinan bisa turun menjadi 8,88 persen atau sebesar 28,03 ribu jiwa di tahun 2018.

**Grafik 19.****Jumlah Penduduk Miskin di Kota Cirebon, 2016-2018 (Maret, ribuan orang)**

Sumber : Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2016-2018

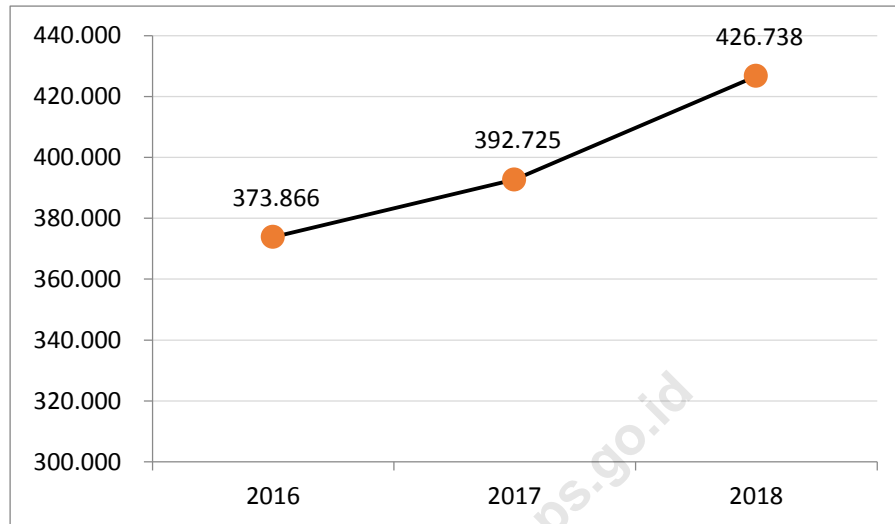
Karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari kondisi demografi, pendidikan dan ketenagakerjaan dari kepala rumah tangga; kondisi perumahan; dan persebarannya menurut kabupaten/kota. Pemahaman mengenai karakteristik rumah tangga miskin penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran.

7.2 Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Cirebon mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2016-2018, tahun 2016 sebesar Rp 373.866, di tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 392.725 dan terus meningkat menjadi Rp 426.738 per bulan pada tahun 2018.

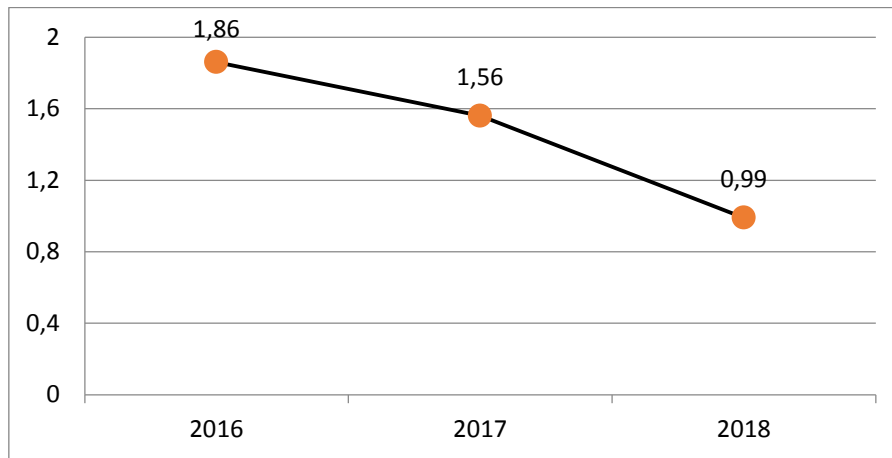
Grafik 20.

Garis Kemiskinan di Kota Cirebon, 2016 - 2018 (Rupiah/Kapita/Bulan)



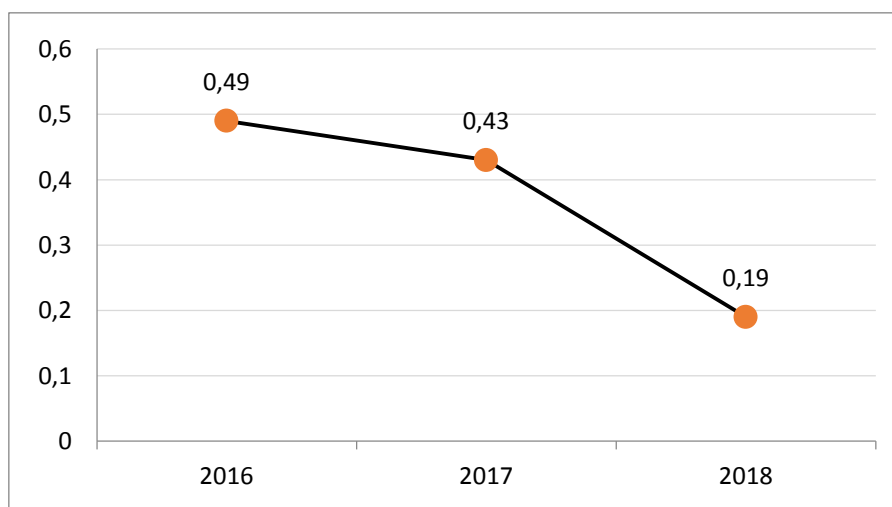
Sumber : Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2016-2018

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Selama periode 2016 – 2018 P1 mengalami fluktuasi, dimana nilai tahun 2016 sebesar 1,86, kemudian tahun 2017 menurun menjadi 1,56 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan lagi sebesar 0,99 . Nilai P1 yang semakin rendah menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat. Diharapkan dengan nilai P1 yang semakin kecil, penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin.

**Grafik 21.****Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Cirebon, 2016 - 2018**

Sumber : Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2016-2018

Indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Sama halnya dengan P1, P2 juga mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 sebesar 0,49 persen dan terjadi penurunan di tahun 2017 menjadi sebesar 0,43 persen dan menurun kembali di tahun 2018 menjadi 0,19 persen. Penurunan nilai indeks menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin kecil. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Grafik 22.**Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di Kota Cirebon, 2016 - 2018**

Sumber: Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2016-2018



Bab VIII

Sosial Lainnya

<https://cirebonkeajaib.com/ps-9/id>



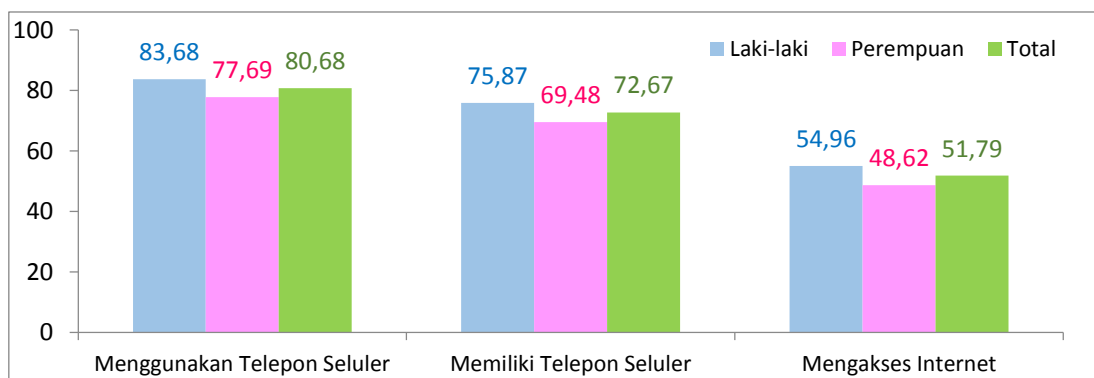
8.1. Teknologi Informasi

Penggunaan internet pada saat ini semakin meluas seiring peningkatan jumlah kepemilikan telepon seluler. Peningkatan penggunaan telepon seluler (*handphone*) cenderung berdampak kepada kepemilikan rumah tangga atas alat teknologi informasi berupa telepon seluler. Saat ini mayoritas penggunaan telepon seluler lebih banyak digunakan selain untuk alat komunikasi juga digunakan untuk mengakses internet. Telepon seluler selain mudah untuk dibawa juga memungkinkan seseorang dapat melakukan berbagai aktivitas dalam waktu bersamaan. Hal inilah yang membuat penggunaan telepon seluler semakin meningkat terutama dalam mengakses internet dibandingkan dengan perangkat lainnya.

Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet dengan menggunakan berbagai perangkat khususnya penggunaan telepon seluler untuk mengakses internet semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada saat ini masyarakat cenderung memilih telepon seluler karena praktis, dapat dibawa bepergian kemana-mana dan lebih bersifat pribadi. Selain itu pula tersedianya kecanggihan teknologi dalam telepon seluler yang dapat mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, menyimpan gambar (foto) dan video, serta merekam gambar dan suara, dan lain-lain. Di tahun 2018, persentase anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas yang menggunakan telepon seluler di Kota Cirebon mencapai 80,68 persen. Sedangkan, persentase anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas yang mengakses internet sebesar 51,79 persen.

Grafik 23.

Persentase Anggota RT Berusia 5 Tahun Ke Atas Menurut Karakteristik Dan Penggunaan Teknologi Informasi, 2018



Sumber: Susenas 2018

8.2 Pemberian Kredit Usaha

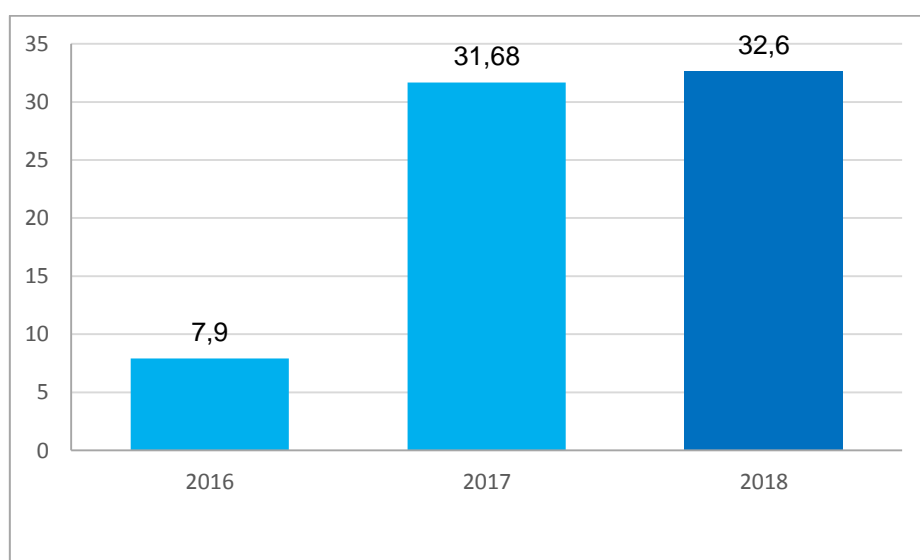
Kredit usaha yang diterima oleh masyarakat akan berdampak positif pada pergerakan ekonomi rakyat yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bentuk-bentuk pelayanan pemberian kredit usaha kepada masyarakat dapat berasal dari pemerintah, perbankan, lembaga keuangan lainnya maupun perorangan. Pemberian kredit usaha ini akan memberdayakan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, produktifitas, dan penyediaan lapangan kerja.

Program-program kredit usaha dari pemerintah diantaranya KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang diberikan oleh beberapa bank terpilih dan PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, Perkotaan, Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal. Selain itu pula terdapat Jenis program penyaluran yang lain seperti KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi), KPEN-RP (Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan, dan KKPE (Kredit Ketahanan Pangan Energi).

Pada tahun 2018 rumah tangga penerima kredit usaha meningkat dari 31,68 persen pada tahun 2017 menjadi 32,6 persen pada tahun 2018.

Grafik 24.

Persentase Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha di Kota Cirebon, 2016-2018



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat 2018



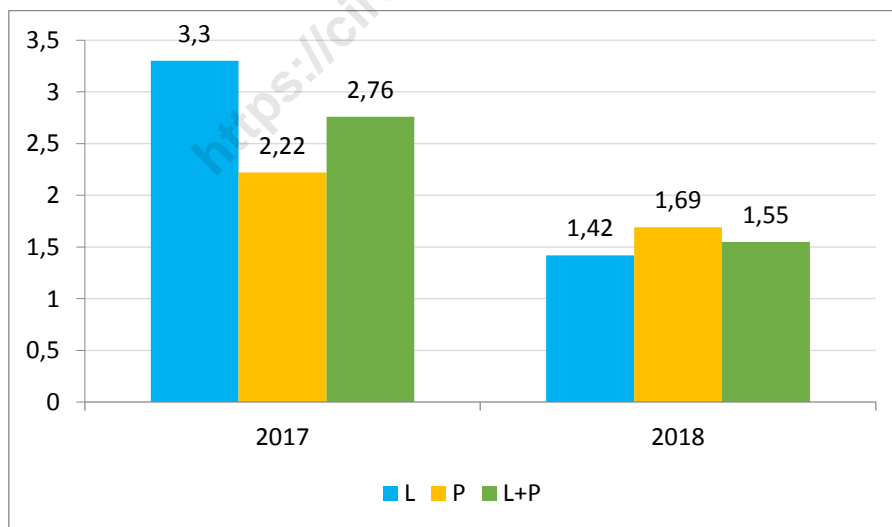
8.3. Tindak Kejahatan

Tingkat keamanan di suatu wilayah dapat digunakan sebagai salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat. Persentase korban tindak kejahatan yang tinggi mengindikasikan masih kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut sehingga mendorong pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Korban kejahatan yang dicakup dalam Susenas 2017 ini adalah semua bentuk korban kejahatan kecuali kejahatan kasus pembunuhan.

Pada periode tahun 2018, penduduk yang menjadi korban kejahatan mengalami penurunan sebesar 1,21 persen dari 2,76 persen di tahun 2017 menjadi 1,55 persen di tahun 2018. Penurunan persentase korban tindak kejahatan pada laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Penurunan korban tindak kejahatan pada laki-laki mencapai 1,88 persen dan penurunan korban tindak kejahatan pada perempuan mencapai 0,53 persen.

Grafik 25.

**Persentase penduduk Menjadi Korban Kejahatan di Kota Cirebon,
Maret 2017-2018**



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat 2018



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT 2019

<https://cirebonkota.bps.go.id>

DATA

Mencerdaskan Bangsa

Enlighten The Nation



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA CIREBON**

Jl Sekarkemuning I Evakuasi Kota Cirebon 45136

Email: bps3274@bps.go.id Web: cirebonkota.bps.go.id

Telp: 0231- 485524 Fax: 0231 - 484403